

Perempuan sebagai Agen Perubahan Lingkungan: Peran Pengelolaan Sampah dalam Mendukung Program Strategis Nasional

Yuyun Sunesti

Universitas Sebelas Maret, yuyun_sunesti@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu strategis pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perempuan sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Meskipun secara historis perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengurangan timbulan sampah, peningkatan kesadaran lingkungan, dan pengembangan ekonomi sirkular, peran tersebut masih belum memperoleh pengakuan dan dukungan yang memadai dalam sistem tata kelola pengelolaan sampah. Artikel ini bertujuan mengkaji peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pengelolaan sampah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi melalui kepemimpinan akar rumput, pengembangan bank sampah, edukasi lingkungan, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular di tingkat komunitas. Namun, optimalisasi peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, serta minimnya keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan organisasi perempuan, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil melalui kebijakan yang responsif gender, penguatan kapasitas, serta penyediaan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan agar pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, inklusif, dan mendukung pencapaian agenda pembangunan strategis nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (literature review) dengan menganalisis publikasi ilmiah yang terindeks Scopus mengenai peran perempuan dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Kata kunci: Perempuan, Pengelolaan sampah, Agen perubahan, Pembangunan strategis nasional, Tata kelola kolaboratif

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tata kelola perkotaan. Dalam perspektif sosiologi lingkungan, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga dengan relasi sosial, partisipasi masyarakat, serta distribusi peran antaraktor dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan

berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan rumah tangga.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas strategis nasional. Komitmen tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, serta Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017. Melalui Jakstranas, pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari total timbunan sampah pada tahun 2025 (Plastic Smart Cities, 2024). Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan penetapan program pengelolaan sampah terpadu sebagai salah satu dari tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada era Pemerintahan Prabowo tahun 2026 (Pajakku, 2025).

Pencapaian target tersebut tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah, tetapi memerlukan pendekatan multiaktor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, lembaga masyarakat sipil, serta komunitas lokal. Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan, terutama perempuan yang selama ini berperan sebagai pengelola utama sampah di tingkat rumah tangga sekaligus penggerak berbagai inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan mendominasi praktik pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini berakar pada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama kebersihan dan pengelolaan rumah tangga. Konstruksi tersebut kemudian meluas ke ruang publik melalui konsep *ibuisme*, yaitu ideologi yang menempatkan peran sebagai ibu dan pengelola rumah tangga sebagai identitas utama perempuan (Pakasi dkk., 2024). Berangkat dari peran domestik tersebut, banyak perempuan berkembang menjadi aktor penting dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan mendirikan dan mengelola bank sampah, memimpin kelompok daur ulang, mengorganisasi kegiatan kebersihan lingkungan, serta mengadvokasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Meskipun demikian, berbagai kebijakan pengelolaan sampah masih lebih banyak menempatkan perempuan sebagai pelaksana program daripada sebagai agen perubahan yang memiliki ruang dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Akibatnya, kontribusi perempuan sering dipandang sebagai perpanjangan dari peran domestiknya, bukan sebagai bentuk kepemimpinan sosial yang memiliki nilai strategis dalam tata kelola lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan melalui penyediaan sarana dan regulasi, tetapi juga memerlukan pengakuan terhadap kapasitas perempuan sebagai aktor pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana peran perempuan dapat dimaksimalkan sebagai agen perubahan dalam pengelolaan sampah, serta dukungan apa yang diperlukan, khususnya dari pemerintah, untuk mengoptimalkan potensi tersebut dalam kerangka Proyek Strategis Nasional. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif peran-peran strategis perempuan dalam pengelolaan sampah di Indonesia, mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat sinergi antara organisasi perempuan dan

pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah yang inklusif dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur (*literature review*) untuk mengkaji secara komprehensif bukti empiris dan konseptual mengenai peran perempuan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Sumber data utama berasal dari artikel ilmiah yang terindeks dalam basis data Scopus, dengan pertimbangan bahwa Scopus merupakan salah satu basis data multidisiplin terbesar yang menyediakan publikasi akademik bereputasi dari berbagai bidang ilmu.

Pencarian literatur dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Inggris, antara lain *women AND waste management AND Indonesia*, *female AND recycling AND community*, *gender AND circular economy AND Indonesia*, *waste bank AND women AND empowerment*, *perempuan AND pengelolaan sampah*, serta berbagai kombinasi kata kunci lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) artikel yang diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus selama periode 2020–2026; (2) membahas keterlibatan perempuan atau perspektif gender dalam pengelolaan sampah, daur ulang, atau ekonomi sirkular; (3) memiliki konteks penelitian di Indonesia atau relevan dengan kawasan Asia Tenggara; dan (4) tersedia dalam bahasa Inggris.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan menyintesis temuan dari berbagai artikel berdasarkan tema-tema utama yang muncul. Tema-tema tersebut meliputi: (1) peran dan kontribusi perempuan dalam pengelolaan sampah; (2) tantangan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan; serta (3) model kolaborasi antara pemerintah dan organisasi perempuan dalam pengelolaan sampah. Proses analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender, teori pemberdayaan komunitas, dan prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif sebagai kerangka interpretasi terhadap temuan penelitian.

3. ANALISIS DATA

Peran perempuan dalam pengelolaan sampah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi nyata yang mereka berikan, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Keterlibatan tersebut tidak hanya menunjukkan kapasitas perempuan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sampah sehari-hari, tetapi juga memperlihatkan perannya dalam mendorong berbagai inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun demikian, kontribusi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, sosial, dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya serta pengakuan terhadap peran perempuan dalam tata kelola pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kontribusi perempuan dalam pengelolaan sampah, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut, serta bentuk tata kelola dan kolaborasi dengan pemerintah yang dapat memperkuat peran perempuan dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1. Peran Kunci dan Kontribusi Perempuan dalam Pengelolaan Sampah

Temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan merupakan aktor sentral dalam sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas di Indonesia. Keterlibatan perempuan tidak hanya terbatas pada aktivitas domestik, tetapi berkembang menjadi kepemimpinan komunitas yang mendorong pengurangan sampah, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Peran tersebut berakar pada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama pekerjaan perawatan (*care work*) dan kebersihan rumah tangga. Menurut Pakasi dkk. (2024), ideologi *ibuisme* di Indonesia berkontribusi pada feminisasi tanggung jawab lingkungan dengan menjadikan pengelolaan sampah sebagai perpanjangan dari tugas domestik perempuan. Meskipun konstruksi tersebut berpotensi menempatkan perempuan dalam situasi yang rentan terhadap eksploitasi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan mampu mentransformasikan beban kultural tersebut menjadi modal sosial yang mendorong perubahan di tingkat komunitas.

Penelitian Asteria dan Herdiansyah (2022) di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa bank sampah yang dipimpin perempuan tidak hanya meningkatkan volume daur ulang, tetapi juga menjadi media edukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah sekaligus menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah berbasis perempuan menghasilkan manfaat yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Keberhasilan serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Di Kota Bandung, perempuan yang tergabung dalam koperasi Wahana Usaha Jaya (WUJ) berperan aktif membangun etika kepedulian terhadap lingkungan melalui pendidikan masyarakat dan penguatan jaringan partisipasi komunitas sehingga mampu mendorong perubahan perilaku rumah tangga dalam pengelolaan limbah (Bainus dkk., 2025). Sementara itu, komunitas Daur Resik yang beroperasi di Klaten, Magelang, Solo, Sukoharjo, dan Yogyakarta menerapkan pendekatan ekofeminis, ekokratis, dan interseksional untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah sebagai sumber daya yang bernilai. Pendekatan tersebut mendorong praktik pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan limbah, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup bersama (Rahmayna, 2025).

Peran strategis perempuan juga terlihat dalam penerapan ekonomi sirkular di berbagai daerah. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, perempuan berperan penting dalam mengolah sampah organik menjadi kompos berkualitas tinggi serta mendaur ulang sampah anorganik menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi (Syauqi, Lestari, dan Romadlon, 2024). Temuan yang sejalan juga ditemukan di Bali, di mana perempuan mengintegrasikan filosofi *Tri Hita Karana*, *awig-awig*, dan *perarem* dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular, perempuan mengembangkan pengolahan sampah organik menjadi kompos, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi, serta membangun sistem pengurangan dan daur ulang sampah yang melibatkan masyarakat secara luas (Chotim, 2025). Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya berada pada tingkat

operasional, tetapi juga mencakup dimensi strategis dalam menggerakkan perubahan sosial dan memperkuat tata kelola lingkungan di tingkat komunitas.

Selain melalui kepemimpinan komunitas, penguatan kapasitas perempuan juga dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang secara khusus ditujukan bagi sektor pengelolaan sampah. Salah satu contohnya adalah program *Women in Waste's Economic Empowerment* (WWE) yang dikembangkan oleh *U.S. Agency for International Development's Clean Cities, Blue Ocean* (CCBO) di Kota Semarang. Program ini memberikan pelatihan teknis, pendampingan usaha, serta akses terhadap permodalan bagi perempuan yang bekerja pada sektor pengelolaan sampah informal. Evaluasi program menunjukkan adanya peningkatan kemandirian, efikasi diri, kesejahteraan ekonomi peserta, serta meningkatnya volume sampah yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang (Astuti dkk., 2026).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas sebagai agen perubahan dalam pengelolaan sampah yang melampaui peran domestik yang selama ini dilekatkan kepada mereka. Kepemimpinan perempuan dalam komunitas, pengembangan ekonomi sirkular, dan keberhasilan berbagai program pemberdayaan membuktikan bahwa penguatan kapasitas perempuan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi, partisipasi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perempuan perlu diposisikan sebagai aktor strategis dalam tata kelola pengelolaan sampah, bukan sekadar sebagai pelaksana kegiatan berbasis komunitas.

3.2. Tantangan Perempuan dalam Pengelolaan Sampah

Temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sehari-hari, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis dan perumusan kebijakan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan struktural yang menyebabkan perempuan lebih banyak menjalankan fungsi operasional, sedangkan otoritas pengambilan keputusan tetap didominasi oleh laki-laki.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan kuatnya konstruksi sosial berbasis gender yang masih berkembang di masyarakat. Pakasi dkk. (2024) menjelaskan bahwa ideologi *ibuisme* membentuk pembagian kerja yang jelas berdasarkan gender dengan menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebersihan rumah tangga sekaligus lingkungan komunitas. Akibatnya, perempuan diposisikan sebagai pelaksana utama berbagai aktivitas pengelolaan sampah, sementara ruang kepemimpinan dan pengambilan keputusan lebih banyak diisi oleh laki-laki.

Temuan serupa dikemukakan oleh Mardiyanti dkk. (2025) melalui penelitian di Kota Tasikmalaya. Penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen regulatif dan implementasi kebijakan di lapangan. Perspektif gender pada umumnya masih berhenti pada dokumen perencanaan tanpa diikuti indikator operasional, alokasi anggaran yang memadai, maupun mekanisme pemantauan yang jelas. Meskipun perempuan aktif mengelola bank sampah dan berbagai kegiatan lingkungan berbasis komunitas, mereka masih memiliki akses yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan

lingkungan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas kelembagaan, kuatnya norma patriarkal, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Dalam banyak kasus, program pengelolaan sampah yang secara operasional dijalankan oleh perempuan justru dirancang dan dikendalikan oleh laki-laki, baik sebagai pejabat pemerintah, pemimpin organisasi masyarakat, maupun kepala keluarga.

Selain hambatan kelembagaan, keterbatasan infrastruktur dan dukungan pembiayaan juga menjadi tantangan penting dalam pengembangan pengelolaan sampah berbasis perempuan. Penelitian Afnan (2025) di Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa berbagai kelompok pengelola sampah masih beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, seperti minimnya fasilitas penyimpanan, kendaraan pengangkut, peralatan pemilahan, maupun akses terhadap pasar daur ulang yang memberikan nilai ekonomi. Keterbatasan tersebut menyebabkan berbagai inisiatif perempuan sulit berkembang secara berkelanjutan meskipun memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi.

Di samping faktor kelembagaan dan infrastruktur, praktik sosial budaya juga membentuk dinamika peran perempuan dalam pengelolaan sampah. Soekiswati dkk. (2024) menunjukkan bahwa ajaran agama dan filosofi lokal memengaruhi cara perempuan memaknai pengelolaan sampah. Nilai-nilai Islam mengenai kebersihan dan tanggung jawab terhadap lingkungan mendorong banyak perempuan Muslim untuk aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus pengamalan nilai keagamaan. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Anwar dkk. (2025), konstruksi tersebut juga melahirkan ekspektasi sosial yang lebih besar terhadap perempuan untuk menjadi penggerak utama aktivitas pengelolaan sampah berbasis komunitas. Akibatnya, perempuan menghadapi beban tanggung jawab yang semakin kompleks karena harus menjalankan peran domestik, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan penguatan peran perempuan dalam pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kapasitas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai pelaksana utama tanpa memberikan ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pengelolaan sampah perlu diarahkan pada penciptaan sistem yang lebih inklusif melalui peningkatan representasi perempuan dalam forum kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan dukungan infrastruktur dan pembiayaan, serta perubahan norma sosial yang memungkinkan perempuan berperan sebagai pemimpin dalam tata kelola lingkungan, bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan berbasis komunitas.

3.3. Upaya Tata Kelola dan Kolaborasi dengan Pemerintah

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut akan berjalan lebih efektif apabila dibangun di atas pengakuan terhadap perempuan sebagai aktor strategis yang memiliki modal sosial, kapasitas kepemimpinan, dan pengalaman dalam mengelola pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Praktik kolaboratif tersebut telah ditunjukkan di berbagai daerah di Indonesia. Di Kota Bandung, kerja sama antara pemerintah kota dan Koperasi Wahana Usaha Jaya (WUJ) menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dan pengolahan sampah, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat melalui kegiatan edukasi dan penguatan partisipasi komunitas (Bainus dkk., 2025). Temuan serupa juga terlihat di Kota Tasikmalaya, di mana kemitraan antara pemerintah daerah dan kelompok perempuan dalam pengembangan bank sampah mampu meningkatkan kohesi sosial sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah (Asteria dan Herdiansyah, 2022).

Model tata kelola kolaboratif tersebut juga berkembang melalui penguatan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Di Kabupaten Garut, penggunaan platform komunikasi digital seperti *WhatsApp* mempermudah koordinasi antara pengelola bank sampah pada tingkat kelurahan dengan pemerintah daerah, meskipun tantangan berupa keterbatasan anggota dan kesenjangan akses teknologi masih dijumpai (Mustapa, 2024). Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar membangun kerangka kelembagaan yang lebih terstruktur melalui pembentukan bank sampah induk yang didukung regulasi pemerintah daerah sehingga sistem pengumpulan dan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih terkoordinasi (Kubota, Horita, dan Tasaki, 2020).

Meskipun demikian, berbagai praktik kolaborasi tersebut masih menghadapi persoalan ketimpangan gender. Pengelolaan sampah di banyak daerah masih sangat bergantung pada tenaga kerja perempuan yang tidak dibayar atau memperoleh imbalan yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perempuan belum sepenuhnya dihargai sebagai bagian dari sistem pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, desain program pengelolaan sampah perlu dikembangkan secara lebih inklusif dengan memastikan distribusi tanggung jawab yang adil antara laki-laki dan perempuan, baik pada pekerjaan operasional maupun dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Upaya tersebut juga memerlukan perubahan norma sosial yang selama ini menempatkan kebersihan lingkungan sebagai tanggung jawab utama perempuan (Pakasi dkk., 2024).

Pendekatan yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan pemberdayaan ekonomi perempuan terbukti memberikan hasil yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah Kelompok Karya Ibu (KKI) di Kampung Areng yang mengembangkan kegiatan pengelolaan sampah menjadi usaha ekonomi melalui produksi vermikompos. Program tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan perempuan, tetapi juga memperkuat jaringan sosial, kapasitas organisasi, dan posisi tawar perempuan dalam komunitas (Ameridyani, Tokito, dan Saizen, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa ketika pengelolaan sampah dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan gender.

Berbagai praktik tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi perempuan umumnya ditandai oleh adanya kepercayaan, komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang jelas, mekanisme akuntabilitas yang transparan, serta komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan perlu ditempatkan sebagai mitra strategis dalam tata kelola pengelolaan sampah, bukan sekadar sebagai pelaksana program pemerintah.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan dalam pengelolaan sampah. Pertama, pemerintah daerah perlu mengembangkan kepemimpinan yang bersifat fasilitatif dengan membangun ruang kolaborasi, memperkuat jejaring antarpemangku kepentingan, serta memfasilitasi berbagi sumber daya antara organisasi perempuan, masyarakat, dan sektor lainnya, bukan semata-mata bertindak sebagai otoritas tunggal dalam pengelolaan sampah (Sarofah dkk., 2025; Saputra, 2025). Kedua, diperlukan kebijakan yang responsif gender melalui pengakuan terhadap kontribusi perempuan, peningkatan representasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan, serta penyediaan dukungan anggaran yang berkelanjutan bagi program pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sampah (Sarofah dkk., 2025). Ketiga, pengembangan program pengelolaan sampah perlu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberdayaan, sebagaimana ditunjukkan dalam praktik di Kabupaten Banyumas, sehingga program lebih mudah diterima, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Syauqi, Lestari, dan Romadlon, 2024).

4. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai pemimpin, inovator, dan penggerak perubahan melalui berbagai inisiatif berbasis komunitas. Kontribusi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kesadaran lingkungan. Namun demikian, peran strategis tersebut masih belum memperoleh pengakuan yang memadai dalam sistem kelembagaan dan proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi peran perempuan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, antara lain ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, serta kuatnya konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai pelaksana utama pengelolaan sampah tanpa diikuti akses yang setara terhadap kepemimpinan dan perumusan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan peran perempuan memerlukan perubahan kelembagaan yang mampu menjamin partisipasi yang lebih inklusif dan setara.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara organisasi perempuan dan pemerintah melalui tata kelola kolaboratif. Pemerintah perlu mentransformasikan perannya dari otoritas tunggal menjadi fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kepemimpinan perempuan melalui kebijakan yang responsif gender, penyediaan sumber daya yang memadai, penguatan kapasitas, serta pengembangan forum kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kerangka Proyek Strategis Nasional pengelolaan sampah, perempuan perlu diposisikan tidak hanya sebagai penerima manfaat (*beneficiary*), tetapi juga sebagai perancang, pengambil keputusan, dan pemimpin program. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan tata kelola pengelolaan sampah yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus

mendukung pencapaian tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

REFERENSI

- Afnan, D. dkk. 2026. *Environmental Communication and Community Empowerment in CSR-based Refuse-Derived Fuel (RDF) Production: A Case Study in Cirebon, Indonesia*. Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan. Vol. 23 No. 1. Hlm. 307–320.
- Ameridyani, A., Tokito, M., & Saizen, I. 2025. *Towards Community-Driven Rural Development: Path of Women Group in Empowering Rural Women's Capacities and Role in Rural Development*. World Development Perspectives. Vol. 39.
- Anwar, M. Z. dkk. 2025. *Islam, Gender, and Civic Environmentalism: Muslim Women's Community-Based Waste Activism in Indonesia*. Qudus International Journal of Islamic Studies. Vol. 13 No. 2. Hlm. 423–472.
- Arry Bainus, Dina Yulianti, Deasy Silvya Sari, Virtuous Setyaka, & Wa Ode Kodrat Rahmatika. 2025. *Women's Leadership in Cooperative and Social Movement in the Issue of Food Waste: Evidence from Bandung City*. World Development Sustainability. Vol. 6.
- Asteria, D., & Herdiansyah, H. 2022. *The Role of Women in Managing Waste Banks and Supporting Waste Management in Local Communities*. Community Development Journal. Vol. 57 No. 1. Hlm. 74–92.
- Astuti, R. H. D. dkk. 2026. *Supporting Plastic Waste Entrepreneurs in Semarang, Indonesia: Using a Personal Agency Approach*. Waste Management & Research. Hlm. 1–10.
- Chotim, E. E. 2025. *Women and Traditions: Integrating Cultural Values and Waste Management Practices in a Circular Economy and Sustainable Environment in Balinese Society*. International Journal of Sustainability in Economic, Social, and Cultural Context. Vol. 21 No. 2. Hlm. 261–284.
- Kubota, R., Horita, M., & Tasaki, T. 2020. *Integration of Community-Based Waste Bank Programs with the Municipal Solid-Waste-Management Policy in Makassar, Indonesia*. Journal of Material Cycles and Waste Management. Vol. 22. Hlm. 928–937.
- Mardiyanti, D. dkk. 2025. *Gender Mainstreaming in Environmental Governance: Analysis of Policy Implementation and Women's Participation in Tasikmalaya*. E3S Web of Conferences. Proceedings of the 3rd International Symposium on Environmental and Energy Policy (ISEEP 2025).
- Mustapa, H. 2024. *Politics and Civil Society in Regional Waste Management*. E3S Web of Conferences. Vol. 506. Proceedings of the 1st International Symposium on Environmental and Energy Policy (ISEEP 2023).
- Pajakku. 2025. *7 Program Strategis Nasional (PSN) Baru Presiden Prabowo*. Pajakku.com. 23 Juli. Diakses 7 Juni 2026.
- Pakasi, D. T., Hardon, A., Hidayana, I. M., & Rahmadhani, P. 2024. *Gendered Community-Based Waste Management and the Feminization of Environmental Responsibility in Greater Jakarta, Indonesia*. Gender, Technology and Development. Vol. 28 No. 2. Hlm. 205–222.
- Plastik Smart Cities. 2024. *Peraturan Pemerintah Terkait Bank Sampah: Landasan Hukum untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*. Plastik Smart Cities–WWF Indonesia. 2 September. Diakses 7 Juni 2026.

- Rahmayna, K. B. 2025. *Daur Resik as an Ecofeminist Recycling Initiative: Living Well with Waste in Five Indonesian Cities for a Better Planetary Life*. Dalam Bauman, W. A., Maarif, S., & Smith, J. D. (Ed.). *Religion, Decolonization, and the Planetary Community*. New York: Routledge.
- Saputra, T. dkk. 2025. *Dynamic of Collaborative Governance in Indonesian Sustainable Waste Management*. Public Administration Issues. Issue 6. Hlm. 43–60.
- Sarofah, R. dkk. 2025. *Bridging Environmental Justice and Policy: A Collaborative Waste Management Approach in Local Level*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1566 No. 1. Proceedings of the 2nd International Conference on Government and Politics (ICGP 2025).
- Soekiswati, S. dkk. 2024. *Exploration of the Impact of Religious Activities on Waste Management Behavior: An Analysis of the Understanding of Environmental Ethics*. WSEAS Transactions on Environment and Development. Vol. 20. Hlm. 46–58.
- Syauqi, N. M., Lestari, S. T., & Romadlon, F. 2024. *Achieving Circular Economy at Integrated Waste Treatment Facility (TPST) in Banyumas: Mediating Effect of Women Roles*. E3S Web of Conferences. Vol. 577. Proceedings of the 4th International Conference on Applied Sciences (ICAS 2024): *Multidisciplinary Research Collaboration for Environmental, Social, and Governance (ESG) Issues*.